

Media	Satelit News
Hari / Tanggal	Selasa, 27 Oktober September 2011

Segera Tarik Semua Mobil Dinas

Badan Pemeriksaan Keuangan meminta agar Pemprov Banten segera menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2010. Salah satunya tentang mobil dinas. Hingga saat ini baru 11 dari 80 mobil dinas yang dipinjamkaikan dikembalikan oleh anggota DPRD Banten.

SERANG, BE— “Rekomendasi dalam LHP BPK itu salah satunya tentang mobil dinas yang dipinjamkan kepada anggota dewan. Penarikan mobil dinas tersebut tentu harus dilaksanakan sepenuhnya,” kata Kasubag SDM, Hukum dan Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten Retno Damayanti, Senin (26/9).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Banten atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor 02b/LHP/XVIII.SRG/05/2011 tertanggal 27 Mei 2011, disebutkan bahwa Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten melakukan pengadaan kendaraan dinas yang peruntukannya tidak tepat. Begitu juga dengan Sekretariat DPRD Propinsi Banten.

Pengadaan kendaraan dinas pada Biro Umum dan Perlengkapan serta Sekretariat DPRD senilai Rp16,89 miliar. Sekretariat DPRD Provinsi Banten juga mengeluarkan belanja perawatan kendaraan bermotor bagi yang tidak berhak senilai Rp472,67 juta.

Pengadaan mobil dinas seluruhnya 80 unit. Yaitu meliputi 20 unit bagi pimpinan alat kelengkapan dewan dan 60 unit untuk anggota dewan. Mobil dinas yang digunakan anggota dewan adalah Toyota/Kijang Innova G automatic tahun 2010 2.000 cc berwarna abu-abu metalik, putih, hitam dan coklat.

Sejak temuan LHP yang disampaikan BPK melalui Rapat Paripurna Istimewa LHP BPK atas laporan keuangan APBD Banten 2010 di DPRD Banten, 13 Juni 2011 lalu sampai bulan ini tercatat baru 11 mobil dinas yang dikembalikan. Terdiri dari satu unit dari anggota Komisi V DPRD Banten Ananta Wahana dan 10 unit dari anggota dewan Fraksi PKS. Ada juga yang tidak diambil yakni Waskurni, anggota Komisi II DPRD Banten.

Fraksi PKS mengembalikan 10 unit mobil dinas per Juli 2011 lalu kepada Pemprov Banten. Rinciannya, lima unit mobil diserahkan kepada Sekretariat DPRD Banten. Yakni yang dipakai Budi Prajogo, Miftahuddin, Siti Saidah Silallahi, Agus Puji

Raharjo dan KH Mas' a Thoyib. Lima lainnya diserahkan ke Biro Umum dan Perlengkapan. Yakni yang dipakai Sanuji Pentamarta, Hilmi Fuad, Saukatuddin, Tuti Elfita, dan Ei Nurul Khotimah.

Retno menegaskan, seluruh catatan yang menjadi rekomendasi

BPK dalam LHP, baik berupa administrasi maupun pengadaan barang dan jasa harus ditindaklanjuti. “Hanya saja, kami belum menerima laporan dari pegawai yang menangani LHP BPK apakah seluruh temuan sudah ditindaklanjuti oleh Pemprov

Banten,” ujarnya.

Diketahui, ada sejumlah mobil yang dikembalikan anggota dewan disalahkan gunakan para pejabat untuk kepentingan pribadinya. Sekretaris DPRD (Sekwan) Banten Dadi Rustandi akhir pekan lalu mengaku sedang melacak atau

menelusuri identitas pegawai Sekretariat DPRD yang diduga menggunakan mobil yang dikembalikan anggota dewan dari Fraksi PKS.

“Dugaan penyalahgunaan mobil dinas anggota DPRD oleh oknum pegawai Setwan sedang kami

.....Segera Tarik Semua Mobil Dinas

telusuri kebenarannya. Kami masih melacak identitas pegawai yang berani menggunakan mobil dinas itu,” kata Dadi.

Dadi menjelaskan, setelah memiliki cukup bukti mobil dinas itu dipakai oleh pegawainya maka pihaknya akan melaporkannya

masalah ini kepada Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. “Jika memang terbukti kami akan laporkan ke Gubernur. Perbuatan yang dilakukan oknum pegawai Setwan ini sudah mencoreng nama baik Setwan,” katanya. (eman/ikhshan tamara)